

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Karena pembangunan di daerah menjadi salah satu indikator atau penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai revisi dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU No. 12 tahun 2008 bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan, dalam rangka desentralisasi maka dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonomi. Selain itu juga, dikeluarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sebagai revisi dari UU No. 25 tahun 1999.

Kabupaten Ngada merupakan daerah otonomi yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus keuangan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Ngada Nomor 63 Tahun 2014 Tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ngada, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pertanggung jawaban pemerintah kepada publik yang bersih merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya memerlukan media tertentu. Salah satu alat untuk memfasilitasi tercapainya laporan keuangan pemerintah daerah yang kompetitif yaitu laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang akurat dengan anggaran, menilai kondisi dan hasil operasional, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efisien dan efektivitas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada di dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan suatu tolak ukur, yaitu dengan menggunakan pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah

daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan (Halim, 2004: 150). Jadi, analisa kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi kinerja, membantu menungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.

Salah satu cara agar pihak publik dapat memantau pemerintah dalam pengelolaan keuangan adalah melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu akun yang termuat di dalam laporan keuangan dan merupakan bukti pertanggungjawaban yang dipublikasikan pemerintah daerah Kabupaten Ngada guna memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Laporan

Realisasi Anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Laporan Realisasi Anggaran menduduki prioritas yang lebih penting dan merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum kemudian disyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas.

Pendapatan daerah merupakan sumber untuk membiayai belanja daerah, baik belanja langsung maupun tidak langsung. Dalam pengalokasiannya, belanja langsung harus mendapatkan porsi paling besar daripada belanja tidak langsung, karena belanja langsung merupakan pengeluaran biaya untuk pembangunan yang nantinya berguna untuk kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan publik. Melalui kewenangan otonomi yang diberikan kepada pemerintah Ngada, maka sudah menjadi tanggungjawab daerah untuk membelanjakan anggaran yang ada agar dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk pembangunan daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari yang direncanakan dan diupayakan agar belanja langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa.

Berikut ini adalah data APBD kabupaten Ngada dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Data APBD Kabupaten Ngada tahun 2016-2018

KETERANGAN	TAHUN					
	2016		2017		2018	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	Rp 822.526.387.751	Rp 786.700.372.942	Rp 841.132.854.774	Rp 823.087.019.373	Rp 782.472.814.528	Rp 761.773.721.395
Pendapatan Asli Daerah	Rp 42.489.366.019	Rp 47.502.339.405	Rp 65.253.752.165	Rp 62.338.200.371	Rp 51.121.989.495	Rp 41.355.093.830
Dana Perimbangan	Rp 650.695.938.637	Rp 618.741.933.315	Rp 658.390.274.844	Rp 641.449.913.286	Rp 598.668.651.000	Rp 590.861.900.755
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 129.341.083.095	Rp 120.456.100.222	Rp 117.488.827.765	Rp 119.298.905.716	Rp 132.682.174.033	Rp 129.556.726.810
BELANJA	Rp 911.324.159.779	Rp 832.825.452.465	Rp 883.783.607.781	Rp 829.609.284.280	Rp 821.148.883.166	Rp 739.148.645.073
Belanja Tidak Langsung	Rp 482.212.463.647	Rp 447.965.328.714	Rp 441.605.317.780	Rp 428.575.013.097	Rp 461.449.853.217	Rp 432.406.166.059
Belanja Langsung	Rp 429.111.696.132	Rp 384.860.123.751	Rp 442.178.290.000	Rp 401.034.271.183	Rp 359.699.029.948	Rp 306.742.479.014
PEMBIAYAAN	Rp 88.797.772.028	Rp 88.775.832.529	Rp 42.650.753.006	Rp 42.650.753.006	Rp 29.171.809.792	Rp -
Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp 89.797.772.028	Rp 89.775.832.529	Rp 42.650.753.006	Rp 42.650.753.006	Rp 29.171.809.792	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Sumber: Kantor BKD Provinsi NTT, 2019

Berdasarkan data pada tabel 1.1. di atas menunjukkan bahwa jumlah anggaran belanja Kabupaten Ngada dari tahun 2016-2018 mengalami penurunan, sedangkan jumlah realisasi belanja mengalami fluktuasi. Pencapaian realisasi dari tahun 2016-2018 belum mencapai target atau anggaran yang telah ditetapkan.

Jumlah anggaran belanja langsung dan tidak langsung dari tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi, sedangkan jumlah realisasi belanja langsung dan tidak langsung tahun 2016-2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah realisasi belanja langsung lebih kecil dari belanja tidak langsung dengan Total Belanja sebesar Rp. 832.825.452.465 jumlah belanja langsung adalah sebesar Rp. 384.860.123.751 dan jumlah belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 447.965.328.714. Pada tahun 2017 jumlah realisasi belanja langsung lebih kecil dari belanja tidak langsung dengan total belanja sebesar Rp. 836.658.218.192 jumlah belanja langsung adalah sebesar Rp. 394.043.372.778 dan jumlah belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 442.614.845.414. Pada tahun 2018 jumlah realisasi belanja langsung lebih kecil dari belanja tidak langsung dengan total belanja Rp. 182.584.490.125 jumlah belanja langsung adalah sebesar Rp. 27.108.132.915 dan jumlah belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 155.476.357.210. Jika di bandingkan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 pada kabupaten Ngada, komposisi pengalokasian belanja daerah terhadap belanja langsung dan tidak langsung yang terjadi tidak

memenuhi syarat komposisi ideal karena belanja tidak langsung selalu lebih besar dari belanja langsung dan hal ini akan berdampak pada kualitas.

Hal ini juga tidak terlepas dari masalah pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum sepenuhnya menggunakan aplikasi yang terintergritas, masih rendahnya kedisiplinan dalam administrasi pengelolaan keuangan dan keterbatasan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini penetapan pegawai yang belum tepat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah dengan mengambil judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2016-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2016-2018 yang diukur dengan menggunakan Rasio Keuangan ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemda Kabupaten Ngada.Tahun Anggaran 2016-2018 dengan menggunakan Rasio Keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.
2. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Ngada, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.
3. Bagi calon peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian yang lebih lanjut yang berkaitan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.